

Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase

Sundari¹, Jamaluddin Ahmad², Nurjannah Nonci³

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia
sundari.kawaru@gmail.com¹, jahmadlodo@yahoo.co.id²,
noncinurjannah@yahoo.com³

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi UU no 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, dan untuk mengetahui seberapa besar faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.268 yang dimana pengambilan sampel yang digunakan yaitu Probability Sampling, dengan teknik sampling acak/random sampling dengan Menggunakan Rumus Yount 5% dengan jumlah Sampel 63, Penelitian ini menggunakan metode Dekriptif Kuantitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Kuesioner (Angket), Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah, uji Kualitas Data, Statistik Dekriptif, Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan SPSS 16.0 dan Skala Likert. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Pengaruh antara Implementasi UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading di kategorikan “Berpengaruh/signifikan”, Kemudian Seberapa Besar Faktor Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Sebesar 32.4%.

Kata Kunci: Implementasi, Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa Lagading

I. PENDAHULUAN

Dari Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar Nomor 06 Tahun 2014 BUMDesa, adalah Badan Usaha sebagian besar hasilnya masuk di dana Desa Melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan, untuk mengelola

aset, usaha, dan jasa pelayanan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDesa adalah lembaga usaha yang artinya berfungsi melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Pengelolaan BUMDesa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah

desa melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa yang memfasilitasi untuk membentuk kelompok kerja dalam kelancaran suatu kegiatan BUMDesa tersebut. Lalu tujuan didirikannya BUMDesa adalah mendapatkan penghasilan desa yang dalam artian meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa, dari segi perekonomian desa. Selain itu tujuan dibentuknya BUMDesa adalah membangun kedekatan sosial masyarakat desa, hanya bertujuan sekunder dari BUMDesa, karena kebetulan masyarakat desa sudah merupakan kesatuan sosial sehingga memiliki semangat yang tinggi diantara mereka. Dalam pendirian BUMDesa ini ada empat tahap; Pertama, Pemerintah desa dan masyarakat menyepakati pendirian BUMDes, lalu dikelolanya BUMDesa dengan ditetapkannya Persyaratan Pemegang Jabatan, lalu diadakannya pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Desa, dan terakhir melaporkan Pertanggungjawaban Pengelola. Dalam keseharian pengelola harus mengacu pada peraturan yang sudah disepakati sebagaimana terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar (ART/AD) BUMDesa. Serta sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDesa yaitu (1) Sukarela dan terbuka, (2) Kontrol dari warga yang

demokratis, (3) Partisipasi ekonomi warga, (4) Otonomi dan independen, (5) pemerhatian warga masyarakat, (6) Kerjasama antar BUMDesa.

Masalah yang kemudian muncul ketika melakukan observasi adalah tidak efektifnya pengelolaan BUMDesa hal ini dibuktikan karena tidak adanya pelayanan dan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan sejak didirikannya BUMDesa tersebut mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai tahun saat ini (Kepala Desa). Sementara laporan pertanggungjawaban itu wajib dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 Bab IV pasal 16 dan 17. Dimana tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dari penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa mengapa masalah tersebut tidak efektif karena berdasarkan dari Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab X BUMDesa Pasal 87 sampai pasal 90

Menurut Gordon (1986) (Keban, 2014:76) Implementasi dipadankan dengan kegiatan yang terarah pada perealisasi program. Berbagai kegiatan berarti mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program, Maka tempat yang menjadi penelitian yaitu di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, Melihat

dari kondisi lingkungan banyak yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDesa lagading misalnya perikanan, pertanian dan perkebunan. Yang dimana merupakan desa percontohan bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang kini belum memiliki BUMDesa.

Yang kemudian pelaksanaan undang-undang tersebut dapat dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 dan Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2015 sebagaimana membahas tentang tugas pengelola BUMDesa.

A. Konsep Implementasi

Konsep Implementasi Salusu (2008: 409) (Ahmad, 2011: 73) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan.

implementasi sebagai perlakuan yang dilaksanakan individu maupun aparat ataupun sekelompok pemerintah atau swasta yang terarah pada pencapaian tujuan yang terdapat dalam suatu keputusan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 61) (Ahmad, 2011: 73). implementasi kebijakan dalam Widodo (2010: 87) adalah memahami terjadinya suatu program dinyatakan berlaku. Pemahaman yang terjadi terhadap program yang telah dilakukan

kepada masyarakat.

B. Faktor Implementasi

George C. Edward III (1980) (Subarsono, 2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi Agustino (2014: 150) mengemukakan bahwa kebijakan yang disampaikan pun harus akurat, konsisten, dan tepat Komunikasi (Pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan pelaksana harus konsisten dalam melaksanakan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Tanpa sumberdaya, pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berfungsi. Indikator sumber-sumber daya Edward III (Agustino, 2014: 151-152) ada beberapa yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana implementasi, seperti kejujuran, sifat demokratis dan komitmen. Apabila pelaksana implementasi memiliki disposisi yang baik, maka dapat dijalankan

dengan baik oleh pembuat kebijakan, sehingga proses pengimplementasian kebijakan juga menjadi efektif. Indikator disposisi terdiri dari pangkatan birokrat dan insentif menurut Edward III (Agustino 2014: 152-153).

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh/signifikan dimana kebijakan yang telah ditetapkan telah terstruktur dalam suatu organisasi dimana pedomannya yaitu SOPs untuk dicontoh dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tindakan.

Yakni Struktur organisasi/prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dengan ini dapat menyebabkan tidak fleksibelnya suatu organisasi. Dua indikator Edward III (Agustino, 2014: 153-154), yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

C. Indikator Implementasi

Adapun indikator dari implementasi menurut George C. Edward III (1980) (Subarsono, 2005)

1. Transmisi

Transmisi merupakan

suatu penyampaian komunikasi dengan baik yang dapat menghasilkan pengimplementasian menjadi hasil yang baik pula menurut George C. Edward III (1980) (Subarsono, 2005). Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian.

2. Kejelasan

Kejelasan Dimana informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan jelas. Sehingga staff atau anggota biasa akan membuat suatu tugas yang jauh dari pecapaian suatu tujuan sehingga terhindar dari keamanan dalam melaksanakan kebijakan yang baik.

3. Konsistensi

Konsistensi Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi harus jelas dan tidak berubah-ubah. Apabila perintah diberikan berubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan.

4. Staf

Staf adalah hal yang utama dalam sumberdaya. Kegagalan kegagalan yang biasa terjadi dalam melaksanakan implementasi karena kurangnya staf yang tidak kompeten di bidangnya

5. Informasi

implementasi kebijakan adalah informasi yang memiliki dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan. Implementor kebijakan adalah pelaksana kebijakan yang harus tahu melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan daripada pelaksana kebijakan tentang pelaksana kebijakan dari regulasi pemerintah dapat dipatuhi dan ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus patuh terhadap hukum dan mengetahui orang lain yang terlibat juga harus patuh terhadap hukum. Wewenang kekuasaan Pada umumnya harus bersifat formal agar dapat dikontrol pelaksanaannya

6. Wewenang

Kewenangan merupakan pengakuan yang ditetapkan secara politik bagi melaksana dan menjalankan suatu kebijakan.

7. Fasilitas

Fasilitas fisik yang sangat penting dalam melaksanakan implemementasi kebijakan

8. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrat dalam pengimplementasi kebijakan, bila personel tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh atasannya maka akan menjadi hambatan yang nyata bagi pelaksanaan kebijakan. Karena, personel yang dipilih dan diangkat harus orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang ditetapkan, khususnya kepentingan warga.

9. Insentif

Insentif bisa menjadi tehnik untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan salah satunya yaitu dengan manipulasi insentif. Hakikatnya orang akan bergerak berdasarkan kepentingan pribadi mereka, sehingga tindakan dari para pelaksana kebijakan dipengaruhi dari tindakan manipulasi intensif pembuat kebijakan

10. SOP

SOP Satu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) pelaksanaan kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

11. Fragmentasi

Fragmentasi Upaya penyebaran yang harus ditanggunggawapi yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan anatar unit kerja.

D. Konsep Efektivitas

Konsep Efektivitas mengemukakan bahwa Efektivitas sejauhmana tingkat suatu sistem sosial mencapai tujuannya Menurut (Miller) (Tangkilisan,2007;138).

E. Faktor Efektivitas

Faktor Efektivitas Dikemukakan oleh Akib (2009: 117-119) mengemukakan lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

organisasi, maka kriteria yang dipilih adalah:

1. Karakteristik Organisasi, adalah didalam organisasi hubungan sesama staf sifatnya sama. truktur adalah sebuah organisasi yang menempatkan manusia dengan cara yang unik. adanya satu sistem dimana staf yang dapat menentukan komunikasi yang tingkah lakunya tetap dan sama memiliki pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan, ada beberapa macam. (1) lingkungan eksternal yaitu organisasi yang di luar lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi, termasuk pengambilan tindakan dan pembuatan keputusan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang berada didalam organisasi itu sendiri.
3. Karakteristik Pekerja, didalam diri perindividu banyak perbedaan yang ditemui sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas, untuk mencapai keberhasilan organisasi melalui individu yang sadar akan perbedaan yang begitu pentingnya untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai suatu organisasi yang baik maka individu harus mampu mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi
4. Karakteristik Manajemen, adalah mampu menstarakan semua hal sesuai dengan

strategi dan tatacara sehingga efektivitas. Untuk mencapai tujuan orgnisasi pimpinan dapat mempraktekkan manajemen sehingga setiap kegiatan dapat terarah. Dalam melaksanakan kebijakan ini tidak hanya memetingkan strategi yang ada tetapi yang lebih penting memerhatikan manusia sebagai mana mestinya. Mekanisme adalah tata cara menyusun perencanaan, dengan pencarian sumber daya dan pemanfaatannya, kepemimpinan, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, dan pengambilan keputusan, serta lingkungan inovasi organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah

F. Indikator Efektivitas

Menurut *campbell* (1973)(Sutrisno, 2010: 131) ada 21 kriteria

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu pandangan jauh kedepan bahwa organisasi harus melaksanakan seluruh tugasnya untuk mencapai semua sasaran yang ingin dicapai.
2. Kualitas, yaitu kualitas produk atau jasa utama yang sudah dihasilkan oleh organisasi.
3. Produktivitas, yaitu jasa pokok / kuantitas dari produk yang dihasilkan oleh organisasi. Ada tiga tingkatan yang Dapat diukur : tingkat individu,

- kelompok dan keseluruhan organisasi.
4. Kesiapsiagaan. Penilaian menyeluruh mengenai organisasi dapatkemungkinan bahwa organisasi dapat menyelesaikan tugas dengan baik jika diminta.
 5. Efisiensi, merupakan suatu penghasilan yang dapat menghasilkan suatu prestasi tersebut dengan membandingkan beberapa.
 6. Laba, yaitu penghasilan dari modal yang dipakai untuk organisasi yang dijalankan. Jumlah dari sumberdaya yang masih tersisa dengan semua biaya dan kewajiban dipenuhi, biasanya dinyatakan dalam persentase.
 7. Pertumbuhan, yaitu adanya perkembangan suatu organisasi dengan menambahkan hal seperti sumberdaya, fasilitas yang ada dalam organisasi, penjualan, harga, , laba, modal, bagian *market*, dan penemuan baru. Perbandingan organisasi yang sebelumnya dengan yang sekarang.
 8. Pemanfaatan Lingkungan. Sejauh mana organisasi dengan sukses berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu dapat memperoleh sumber daya yang langkah yang diperlukan untuk operasi secara efektif
 9. Stabilitas, yaitu struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu, yang dipelihara khususnya periode-periode yang sulit.
 10. Perputaran atau keluar masuknya karyawan, frekuensi atau banyaknya pemberhentian secara sukarela.
 11. Absentism, banyaknya kemangkiran kerja.
 12. Kecelakaan, Banyaknya kecelakaan yang biasa terjadi dalam pekerjaan
 13. Semangat Kerja, adalah mereka yang mampu bekerja dan berusaha lebih keras untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu organisasi yang meliputi, kebersamaan tujuan, perasaan memiliki dan perasaan terikat.
 14. Motivasi, kekuatan seseorang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan yang diarahkan pada sasaran dalam pekerjaan, merupakan perasaan dorongan melakukan pekerjaan untuk mencapai pekerjaan.
 15. Kepuasan, yaitu adanya kompensasi yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang ada sehingga adanya reward yang diberikan dan peranan yang dianggap dalam suatu organisasi tidak sia-sia.
 16. Internalisasi tujuan organisasi, diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit dalam organisasi. Keyakinan bertujuan

organisasi adalah benar dan layak.

17. Konflik kohesi. Dimensi kutub kohesi, yang menunjukkan satu sama lain saling suka, kerja sama, berkomunikasi penuh dan terbuka, dan terkoordinasikan dalam kegiatan. Dimensi kutub konflik, yaitu perselisihan dalam bentuk kata-kata, fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif
18. Fleksibilitas adaptasi, kemampuan suatu organisasi mengubah standar prosedur operasi dalam menanggapi tantangan lingkungan untuk mencegah terjadinya kebekuan dalam menghadapi rangsangan lingkungan.
19. Penilaian oleh pihak luar, yaitu penilaian suatu organisasi atau mereka dalam artian individu atau organisasi dalam suatu lingkungan organisasi, dengan mengetahui pihak dengan siapa suatu organisasi berhubungan.
20. Iklim, Keadaan lingkungan di dalam organisasi.
21. Kualitas kehidupan kerja. Kualitas perhubungan karyawan dengan lingkungan kerjanya.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Lagading kemudian data yang diperoleh dari kantor Desa

Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang waktu penelitian dilaksanakan sekitar 2 (Dua) Bulan pada tanggal 23 Maret s.d 23 Mei 2016.

B. Populasi

Populasi Pada saat melakukan wawancara dan observasi langsung pada hari Senin, 04 April 2016 terdapat perubahan pada 31 maret tahun 2016, Jumlah masyarakat 1.268 Orang.

C. Sampel

Sampel Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan Rumus Yount (1999) (Ahmad, 2015: 152) dimana populasi berjumlah 1.268 dan respondennya adalah masyarakat desa lagading yang kemudian ukuran sampel populasi akan dipermudah tekhnis penelitian dengan 5% dengan jumlah 63 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan tinjauan ataupun pengamatan secara langsung terhadap penelitian ini.
2. Angket atau kuesioner, adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mendapatkan informasi dari responden yang dia ketahui baik untuk dirinya dan untuk hal yang dia ketahui.
3. Wawancara, yaitu peneliti dengan menilai keadaan seseorang melalui proses tanya

jawab yang diberikan kepada seseorang contohnya mencari data variabel latar asal murid dll, perhatian, pendidikan dan sikap terhadap sesuatu.

4. Dokumentasi, melakukan penelitian dengan metode meneliti benda, yang tertulis seperti notulen rapat, buku majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi

Hasil olahan data dari rekapitulasi dari variabel Implementasi dengan data sebagai berikut, bahwa faktor komunikasi berjumlah 37.2% dengan kategori "Tidak Baik", hasil rekapitulasi dari Faktor sumber daya berjumlah 56.2% dikategorikan "ragu-ragu atau kadang-kadang", Hasil rekapitulasi dari faktor disposisi berjumlah 74.6% dikategorikan "Baik atau setuju" dan Rekapitulasi dari faktor Struktur birokrasi berjumlah 35.9% dikategorikan "Hampir tidak pernah" dimana hasil keseluruhan dari faktor implementasi berjumlah 53.7% dari 100% yang diharapkan maka dari jumlah 53.7% memiliki kategori "Cukup terlaksana dengan baik"

B. Efektivitas

Kemudian hasil olahan data dari rekapitulasi faktor Efektivitas pada rekapitulasi pertumbuhan memperoleh nilai 47.2%

dikategorikan "Ragu-ragu atau kadang-kadang", Semangat kerja memperoleh nilai 46.2% dikategorikan "ragu-ragu", kepuasan kerja memperoleh nilai 24% dikategorikan "Hampir tidak pernah" dan kualitas kehidupan kerja memperoleh nilai 30.4% dengan kategori "hampir tidak pernah", dimana hasil keseluruhan dari faktor Efektivitas berjumlah 36.95% dari 100% yang diharapkan maka dari jumlah 36.95% memiliki kategori "Hampir tidak pernah".

Adapun total keseluruhan nilai dari Variabel X (Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa) adalah sebesar 2470. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus hasil ideal dengan total sebesar 52%, kemudian total keseluruhan nilai dari Variabel Y (Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa) adalah sebesar 1063. Dengan hasil persentase 42 % dimana dikategorikan "Cukup Berpengaruh". Untuk mengetahui jumlah dari kedua variabel yaitu maka dapat digunakan Rumus Hasil Ideal diperoleh nilai sebesar 51% dikategorikan "cukup berpengaruh".

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) sebagaimana teela diolah data dengan menggunakan SPSS 16.0 diketahui bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun

2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, dengan menggunakan Analisis regresi Linier sederhana untuk mengetahui pengaruh dari Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase didapat persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = 4.785 + 0.308 X$, kemudian nilai $F = 29.197$ dengan taraf signifikan 0,05 dan nilai $t_{hitung} = 5.403$. Maka dapat dijelaskan melalui keputusan yang telah di tetapkan ternyata nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $5.403 > 2.000$, maka H_0 nol ditolak dan H_a alternatif diterima, artinya signifikan. Jadi, Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa berpengaruh/signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase

Hasil dari tabel Model Summary, Pada bagian ini ditampilkan nilai $R = 0.569$ dan koefisien Determinasi R^2 atau (R^2) sebesar 0.324 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau $0.569 \times 0.569 = 0.324 \times 100\% = 32.4\%$), sedangkan sisanya ($100\% - 32.4\% = 67.6\%$) Hal ini menunjukkan pengertian bahwa untuk mencari besar faktor Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun

2014 tentang Desa (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Y) dengan ini nilai yang dicari yaitu sebesar 32.4%. Namun untuk membuktikan dari hipotesis pada bab II maka akan di uji One sample t Test

Ini ada hubungannya dengan t hitung pada tabel one sample test dengan menggunakan tabel t. Dari hasil SPSS $t_{hitung} = 3.443$ dengan taraf signifikan $\alpha = 0.001$. carilah nilai t-tabel menggunakan tabel t untuk uji dua pihak dengan rumus: $df N - 1 = 63 - 1 = 62$ sehingga nilai t -tabel = 1.671.

Ternyata $t_{hitung} = t_{tabel}$ atau $3.443 = 1.671$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya faktor-faktor Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase tidak sebesar 70% dari rata-rata nilai ideal dengan ini nilainya sebesar 32.4%.

IV. KESIMPULAN

Dari Hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Implementasi UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa “Berpengaruh/signifikan” terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Sebesar 32.4%

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA. Bandung.
- [2] Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Bandan Penerbit UNM.Makassar.
- [3] . 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Teori dan Aplikasi.Gava Media.Yogyakarta.
- [4] Anonim. Konsep Efektivitas. <http://citrahutabarat.blogspot.co.id/2011/10/konsep-efektivitas-organisasi.html> (28 Desember 2015).
- [5] Anugraha, Indra. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenereng Rappang. STISIP M. Rappang.
- [6] Hasibuan, Malayu S. P., 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara.Jakarta.
- [7] Keban, Yeremias T., 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan isu*. Gava Media.Yogyakarta.
- [8] Liestyodono B.I. 2004. *Efektivitas Organisasi*: Jakarta. <https://scazda.wordpress.com/2013/01/08/efektivitas-organisasi/> (28 Desember 2015)
- [9] Maryunani. 2008. <https://p4ino.wordpress.com/category/bum-desa/> (22 januari 2016).
- [10] Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. ALFABETA. Bandung.
- [11] Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [12] Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [13] Riduwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. ALFABETA. Bandung.
- [14] Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*.Erlangga. Jakarta.
- [15] Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA. Bandung.

- [16] . 2014. Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA. Bandung.
- [17] . 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). ALFABETA. Bandung.
- [18] Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana. Jakarta.
- [19] Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2007. *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- [20] Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, struktur, budaya dan perubahan organisasi*. ALFABETA. Bandung.
- [21] Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan, dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- [22] . 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- [23] Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.
- [24] Yenie Paramitha Ginting, Pengaruh Implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi terhadap Efektivitas organisasi di sekretariat daerah kabupaten bolaang mongodow Utara. <http://ejournal.Unsrat.ac.id/index.php/jia/article/download/2485/2021> (24 Maret 2016).